

ABSTRAK

Harta dalam kehidupan manusia tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membantu atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, salah satunya melalui hibah. Hibah merupakan pemberian harta tanpa mengharapkan balasan, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g. Meskipun tujuan utama hibah adalah untuk mempererat tali silaturahmi, praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji Putusan Pembatalan Hibah Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Gs pada Pengadilan Agama Gresik dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Fokus utama penelitian ini yaitu menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah serta kesesuaiannya dengan ketentuan KHI.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perkara (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan Teknik Analisis Data menggunakan deskriptif analisis. Untuk metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan dua bidang tanah tambak yang mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum dengan cermat serta mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum. Hakim menegaskan objek sengketa adalah harta milik Penggugat dari hasil penjualan warisan orang tuanya. Hibah yang dilakukan istri Penggugat kepada Tergugat melanggar ketentuan karena melebihi 1/3 dari total harta. Meskipun ada perbedaan pandangan di tingkat banding, Mahkamah Agung menguatkan putusan ini, membatalkan hibah, dan memerintahkan Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat. Putusan hakim dalam perkara ini sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait syarat penghibah, batasan harta yang dapat dihibahkan, dan status kepemilikan. Hakim membatalkan hibah karena melebihi batas maksimal 1/3 dari total harta dan harta yang dihibahkan merupakan harta bersama suami istri. Meskipun Penggugat memberikan persetujuan, ia tidak memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatangani. Putusan ini menegaskan prinsip dalam KHI bahwa hibah dalam hal ini dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 210 KHI, sehingga mencerminkan penerapan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Pengadilan Agama Gresik, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Assets in human life not only function to fulfill personal needs, but can also be a means to help or provide happiness to others, one of which is through grants. A grant is a gift of property without expecting anything in return, as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171 letter g. Although the main purpose of grants is to strengthen the relationship, in practice it often causes legal problems if it is not carried out in accordance with applicable regulations. This research examines Grant Cancellation Decision Number 768/Pdt.G/2023/PA.Gs at the Gresik Religious Court from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The main focus of this research is to analyze the basis of the judge's consideration in deciding the cancellation of the grant and its suitability with the provisions of KHI.

This research method uses a type of qualitative research with a case approach, this research uses three types of data sources, namely primary, secondary and tertiary data sources, with data analysis techniques using descriptive analysis. For data collection methods, namely documentation studies, interviews, and literature studies, with data analysis techniques using the deductive method.

The results showed that the judge canceled two plots of pond land by carefully considering evidence, witness testimony, and legal facts and considering aspects of legal certainty and legal justice. The judge emphasized that the object of dispute was the Plaintiff's property from the sale of his parents' inheritance. The grant made by the Plaintiff's wife to the Defendant violated the provisions because it exceeded 1/3 of the total assets. Although there were different views at the appellate level, the Supreme Court upheld this decision, annulled the grant, and ordered the Defendant to return the disputed object to the Plaintiff. The judge's decision in this case was in accordance with the perspective of the Compilation of Islamic Law, especially regarding the requirements of the grantee, the limit of assets that can be granted, and ownership status. The judge annulled the grant because it exceeded the maximum limit of 1/3 of the total assets and the property granted was joint property of the husband and wife. Although the Plaintiff gave consent, she did not understand the legal consequences of the signed document. This decision confirms the principle in KHI that the grant in this case can be canceled because it does not meet the conditions set out in Article 210 KHI, thus reflecting the application of Islamic law applicable in Indonesia.

Keywords: Grant Cancellation, Gresik Religious Court, Compilation of Islamic Law.